



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH ACEH
TAHUN 2019**

BIRO ORGANISASI SETDA ACEH 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. HELVIZAR, M.Si
Jabatan : Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir NOVA IRIANSYAH, MT
Jabatan : Plt GUBERNUR ACEH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh,

2019

Pihak Kedua,

Ir NOVA IRIANSYAH, MT

Pihak Pertama,

Ir. HELVIZAR, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH ACEH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Birokrasi yang efektif dan efisien	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi 1.2 Persentase aparatur yang mendapat pembinaan dan pengembangan 1.3 Persentase aparatur yang menduduki jabatan berdasarkan kompetensi 1.4 Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi tepat ukur 1.5 Persentase ketersediaan SOP pada SKPA 1.6 Persentase Penyerahan Aset dari Daerah Induk kepada Daerah Pemekaran (P3D) 1.7 Jumlah fasilitasi penyelesaian segmen batas daerah antar Kab/Kota 1.8 Ketepatan waktu penyerahan LKPJ Gubernur Aceh 1.9 Persentase pertumbuhan keuntungan daerah (BUMA) melalui kebijakan daerah 1.10 Persentase tercapainya kebijakan strategis perekonomian 1.11 Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah	62,35 90% 90% 87% 60% 73% Kawal 3 segmen 29 Maret 10% 50% 98%
2.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	2.1 Indeks pelayanan publik 2.2 Jumlah dokumen/naskah dinas yang ditangani sesuai SOP 2.3 Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan	70/B 90% 40%
3.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	3.1 Nilai SAKIP 3.2 Persentase nilai SAKIP Pemerintah Kab/Kota di Aceh yang memperoleh nilai CC 3.3 Skor dan status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh (LPPA) 3.4 Persentase Kecamatan yang sudah menerapkan PATEN 3.5 Persentase penerapan pengelolaan dan pelaksanaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa 3.6 Persentase kesesuaian pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa dengan RUP 3.7 Persentase kasus hukum pengadaan barang dan jasa yang di selesaikan 3.8 Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai dengan RUP	62 55% 2,65/Tinggi 43% 89% 85% 80% 85%
4.	Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al-quran dan Al-hadist, Ijma dan Qiyas	4.1 Persentase rekomendasi / kebijakan / naskah di bidang pembinaan kelembagaan dan pengkajian kerukunan umat beragama yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah	95%
5.	Meningkatnya prasarana dan sarana, keagamaan dan budaya berbasis islami	5.1 Tingkat kepuasan jamaah haji terhadap pelayanan Tim TPHD	95%

6.	Tuntasnya aturan turunan UUPA	6.1	Persentase PP yang diselesaikan	70%
		6.2	Persentase produk hukum kewenangan Aceh yang difasilitasi	63%
		6.3	Persentase produk hukum kewenangan Aceh yang diselesaikan	90%
7.	Meningkatnya kualitas produk hukum dan layanan hukum Pemerintah Aceh	7.1	Persentase produk hukum Kab/Kota yang dikonsultasikan dan fasilitasi/evaluasi yang dapat diselesaikan	90%
		7.2	Persentase penyelesaian gugatan dan sengketa hukum Pemerintah Aceh.	80%
		7.3	Persentase bantuan hukum fakir miskin yang diselesaikan	90%
		7.4	Persentase MoU/MoA yang diselesaikan	100%
		7.5	Persentase produk hukum Pemerintah Aceh yang disajikan dalam website JDIH	100%
8.	Meningkatnya transparansi informasi publik	8.1	Persentase informasi publik yang diumumkan	65%
		8.2	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	80%
		8.3	Persentase press release/iklan/pariwara yang dipublikasikan melalui media massa lokal terkemuka dan nasional	83%
		8.4	Persentase informasi daerah yang terintegrasi	83%
		8.5	Tingkat kepuasan pengakses data dan informasi	83%

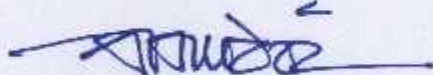
Program

Anggaran

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	62.530.065.725,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	38.430.484.464,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	958.200.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	4.579.610.000,00
5	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	399.094.258,00
6	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	9.750.102.564,00
7	Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Rp	782.948.000,00
8	Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur	Rp	528.180.000,00
9	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp	8.512.280.000,00
10	Program Penataan Peraturan Perundang-Undang	Rp	14.086.443.782,00
11	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp	2.858.322.535,00
12	Program Pegelaran Seni Budaya Daerah	Rp	40.000.000,00
13	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rp	1.812.967.085,00
14	Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Rp	8.960.860.997,00
15	Program Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu	Rp	580.954.000,00

16	Program Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp	251.392.000,00
17	Program Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat	Rp	1.766.317.780,00
18	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp	4.534.632.230
19	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Adat Istiadat	Rp	1.748.370.108,00
20	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi, Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta Instansi Terkait	Rp	4.391.272.969,00
21	Program Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan	Rp	4.755.700.000,00
22	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Strategis	Rp	2.437.601.000,00
23	Program Peningkatan Mutu SDM, Pengembangan Kerjasama dan Advokasi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	1.831.175.000
24	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Elektronik	Rp	2.790.908.790,00
25	Program Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pengembangan Potensi Ekonomi	Rp	3.348.025.000,00
26	Program Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rp	11.213.681.210,00

Plt. Gubernur Aceh,

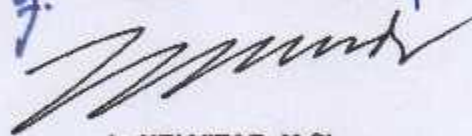


Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Banda Aceh,

2019

Plt. Sekretaris Daerah Aceh,



Ir. HELVIZAR, M.Si